



# Proyek UPS Terus Didalami

## Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Diperiksa BPKP dan Inspektorat

**SEORANG** pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berinisial AU yang bertugas di Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta yang diduga terlibat pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) atau alat penyimpanan daya listrik ternyata sudah dipanggil oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

PNS senior yang kini berdinis di Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Selatan itu ingin diminta keterangannya terkait pengadaan alat senilai Rp 330 miliar yang dianggarkan dalam APBD Perubahan DKI 2014 lalu. Sayangnya, yang bersangkutan tidak bersedia memenuhi panggilan gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut. Dengan alasan terkena penyakit stroke ringan.

AU yang merupakan ayah dari salah satu anggota DPRD DKI Jakarta asal Partai Gerindra berinisial R ini memang terkenal kaya raya. "Sudah dipanggil oleh Pak Gubernur tapi yang bersangkutan tak datang. Alasannya sih terkena stroke ringan," ujar sumber terpercaya INDOPOS yang meminta namanya tidak disebutkan kemarin (2/3).

Saat dikonfirmasi, Gubernur Ahok menegaskan kasus pengadaan UPS atau alat penyimpanan daya listrik, sudah masuk ranah hukum dan menjadi konsumsi publik sehingga tidak mungkin ditarik lagi.

Saat ini kasus itu juga sedang ditangani Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) dan Inspektorat DKI. "Kedua instansi itu terlibat untuk melengkapi berkas yang akan dikirim ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujarnya di Balaikota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin (2/3).

Dijelaskannya juga, kemarin (2/3) para Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pendidikan Dasar DKI maupun Kasudin Pendidikan Menengah DKI, masing-masing dari Jakarta Pusat dan Jakarta Barat sudah diperiksa.

"Termasuk sejumlah anak buah para kepala seksi yang diduga mengetahui proyek UPS itu," papar Ahok juga menambahkan.

Menurutnya lagi, pemeriksaan kasus itu akan memakan waktu sekitar satu bulan. Apabila keluar hasilnya akan dilaporkan ke KPK. Dia juga menegaskan, proses pemeriksaan ini sudah bergulir dan tak bisa dihentikan lagi.

"Kita cuma butuh waktu un-

tuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Dari situ nanti terlihat siapa saja yang bermain dan tanggung sendiri risikonya," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu yang mengaku menggulirkan ketidakberesan kasus proyek UPS sebagai bentuk perlawanannya menghadapi hak angket yang digelindingkan DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya juga, pemeriksaan bukan sebatas kasus pengadaan perangkat UPS sekolah yang mencaplok dana APBD Perubahan 2014 sekitar Rp 330 miliar. "Namun juga pendalaman kasus renovasi gedung sekolah yang diduga juga menelan anggaran fantastis," cetus Ahok sembari menambahkan nanti kalau hasil pemeriksaan sudah lengkap akan dipublikasikan kepada masyarakat.

Seperti diketahui, bola liar proyek UPS yang ada dalam APBD Perubahan 2014 terus menggelinding.

Sejumlah nama pejabat di jajaran Dindik DKI Jakarta disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan penyelewengan anggaran ratusan miliar tersebut. Salah satunya pejabat di Sudin Pendidikan Jakarta Selatan berinisial AU.

Pejabat berinisial AU ini diduga mengetahui proyek pengadaan UPS di sejumlah SMA negeri di Jakarta Barat. Lantaran saat proyek itu dilakukan, AU merupakan salah satu pejabat Sudin Pendidikan Jakarta Barat.

Sementara itu, Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun mengatakan sesuai instruksi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, kasus UPL ini sudah dibawa ke jalur hukum, yakni dilaporkan ke KPK. Sehingga siapapun yang terlibat baik itu dari jajaran pejabat Pemprov DKI maupun DPRD DKI akan berhadapan dengan hukum.

"Ya kami sudah ke jalur hukum dengan melapor ke KPK untuk mengungkap dugaan korupsi UPL yang bernilai

fantastis ini. Saya ikut mendampingi gubernur melapor ke KPK pada Jumat (27/2) lalu," ujar Lasro kepada INDOPOS, Minggu (1/3) lalu.

Sedangkan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan (Kasi Sasprasadik) Wilayah II Sudin Pendidikan Jakarta Barat, Eyo Sunarya mengaku tak tahunya ikhwal pengadaan UPS yang dilakukan pada akhir 2014 lalu. Sebab, dia baru sebulan menjabat posisi Kasi Sasprasadik.

"Lebih baik masalah itu langsung ditanyakan saja ke pejabat kasi yang lama. Sekarang beliau dirotasi ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan," jelasnya. (wok)